



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
TAHUN 2024**

PENGATURAN BAWASLU DALAM PMK (PMK 3/2024)

3

- 1) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan;
- 2) Salinan Permohonan dan pemberitahuan sudah pertama disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK;
- 3) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan 1 (satu) kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau daring (*online*) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan. Dalam hal melampaui penilaian diserahkan kepada Mahkamah;
- 4) Dapat mengajukan saksi;
- 5) Dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Bawaslu.

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Pemohon:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

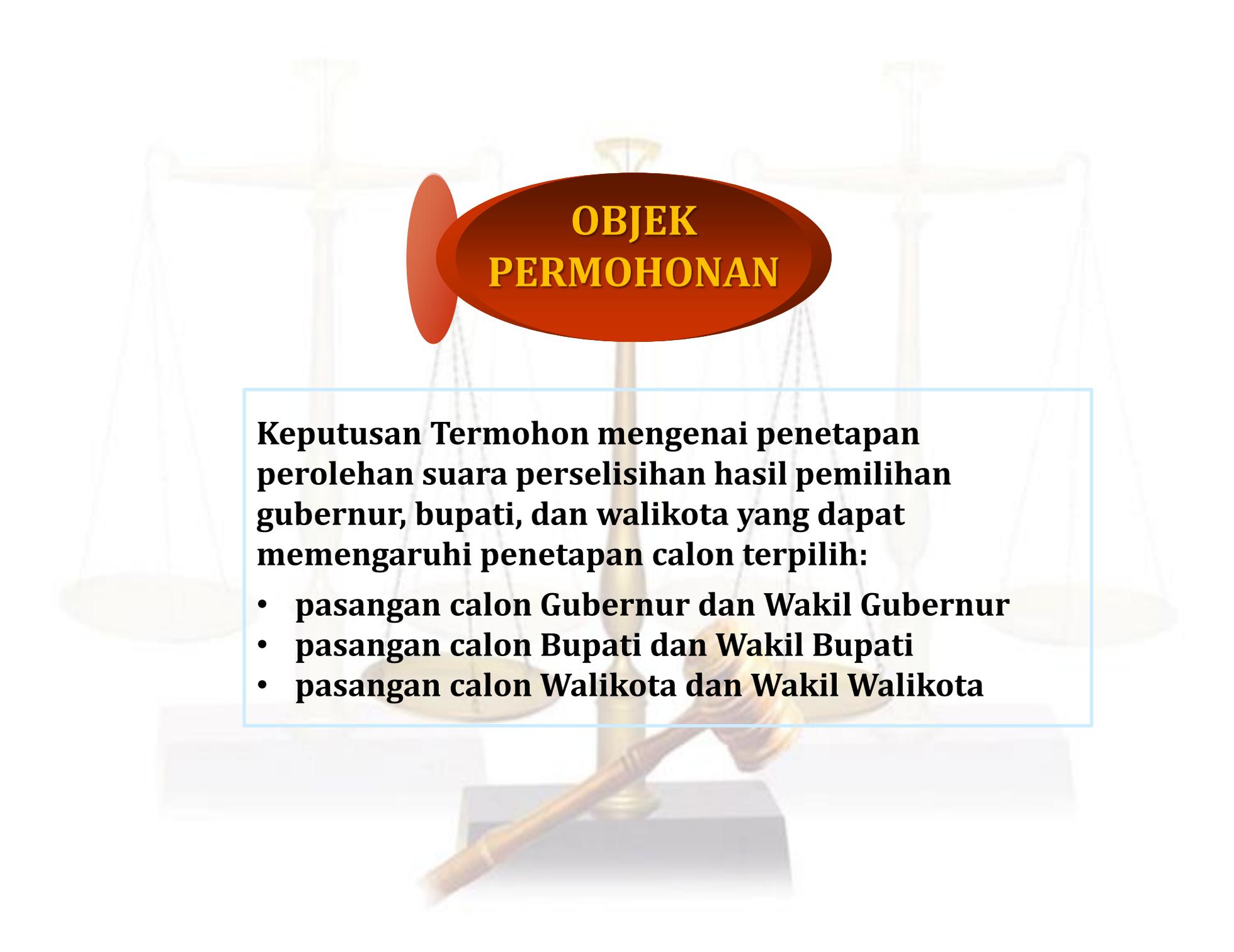
2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)



OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG WAKTU
PENGAJUAN
PERMOHONAN &
PERBAIKAN
PERMOHONAN
PEMOHON**

Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan.

Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan offline) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan online)

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
PERMOHONAN
SEBAGAI PIHAK
TERKAIT**

Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
JAWABAN DAN
KETERANGAN**

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan

KEGIATAN DAN TAHAPAN PENANGANAN PERKARA (PMK 4/2024)

Kegiatan dan tahapan penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemenuhan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
4. Penerbitan e-HPKP3;
5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
6. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
8. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
10. Pemeriksaan Pendahuluan;
11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Pemeriksaan Persidangan;
13. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase I);
14. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
15. Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase I);
16. Pemeriksaan Persidangan (pembuktian);
17. Pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (tahap/fase II);
18. Pengucapan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II); dan
19. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan (tahap/fase II).

KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA

Desember 2024

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Januari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SAB31TU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

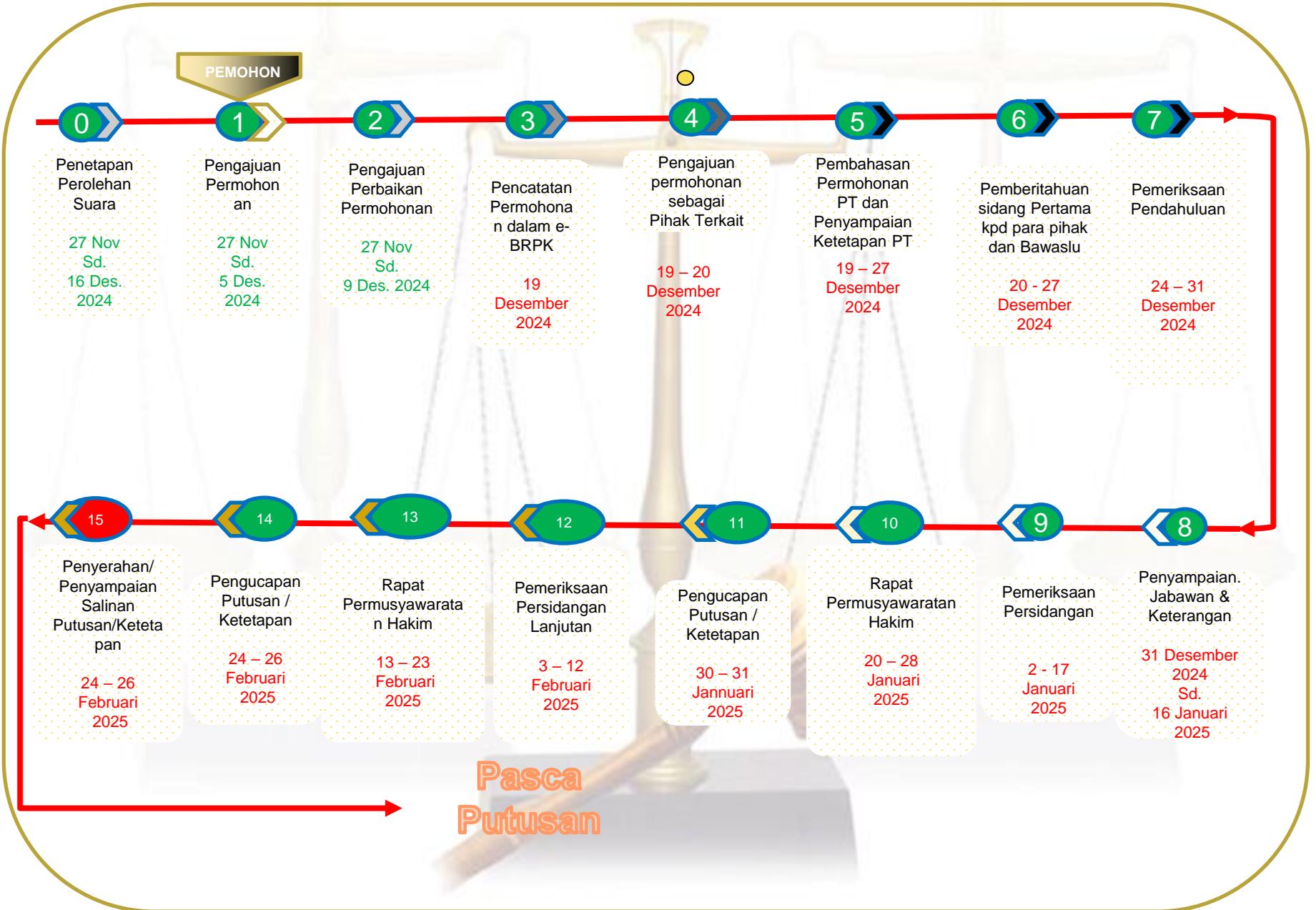
Februari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

Maret 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PHPU PILKADA 2024 (FASE I)



KALENDER PENANGANAN PERKARA PHPU KADA

Desember 2024

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Januari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SAB31TU
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

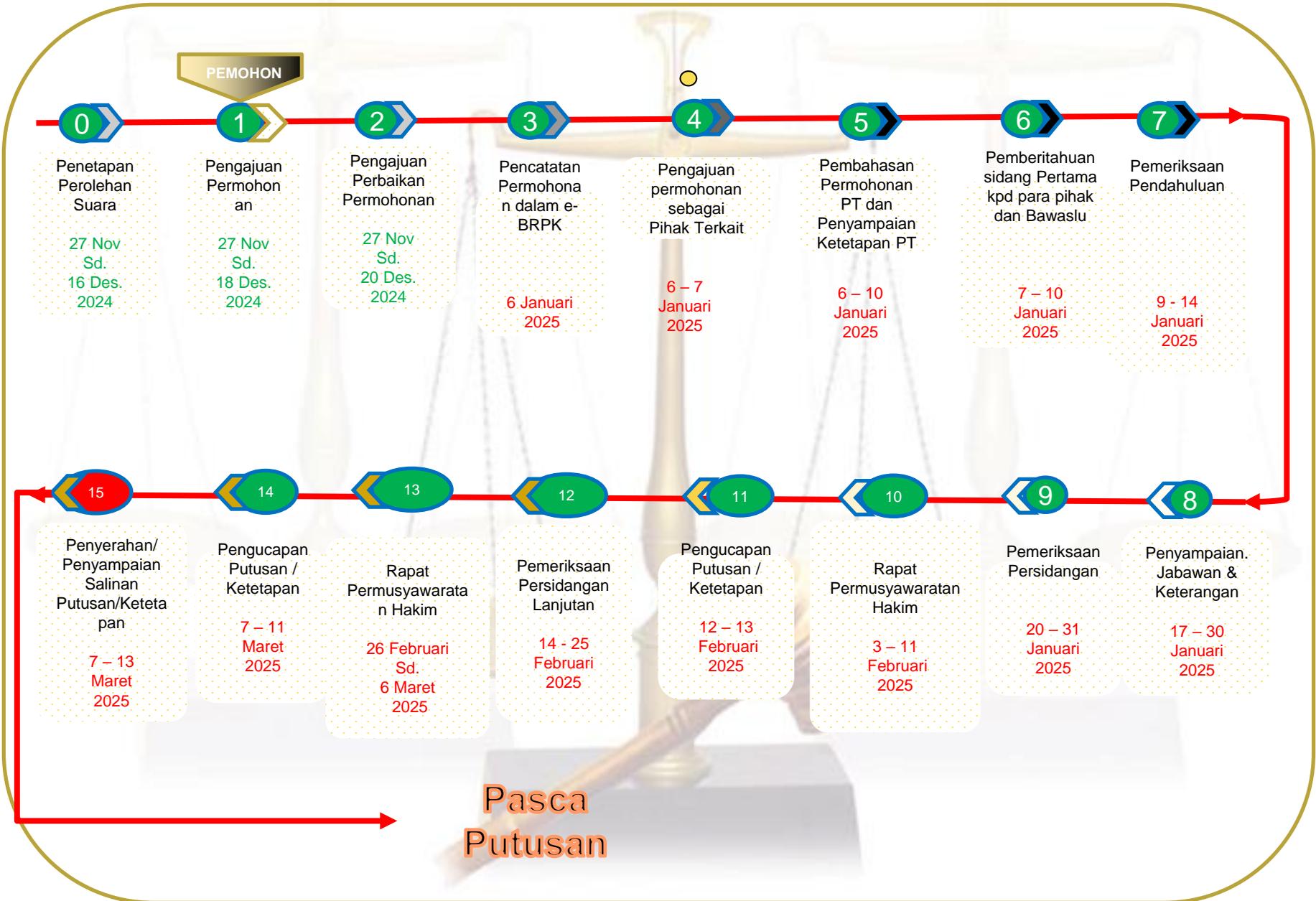
Februari 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	1

Maret 2025

MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMI	JUMAT	SABTU
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

PROSES PENYELESAIAN PERKARA PPHU PILKADA 2024 (FASE II)



SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov - 16 Des 2024

Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB

**Kamis, 5 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

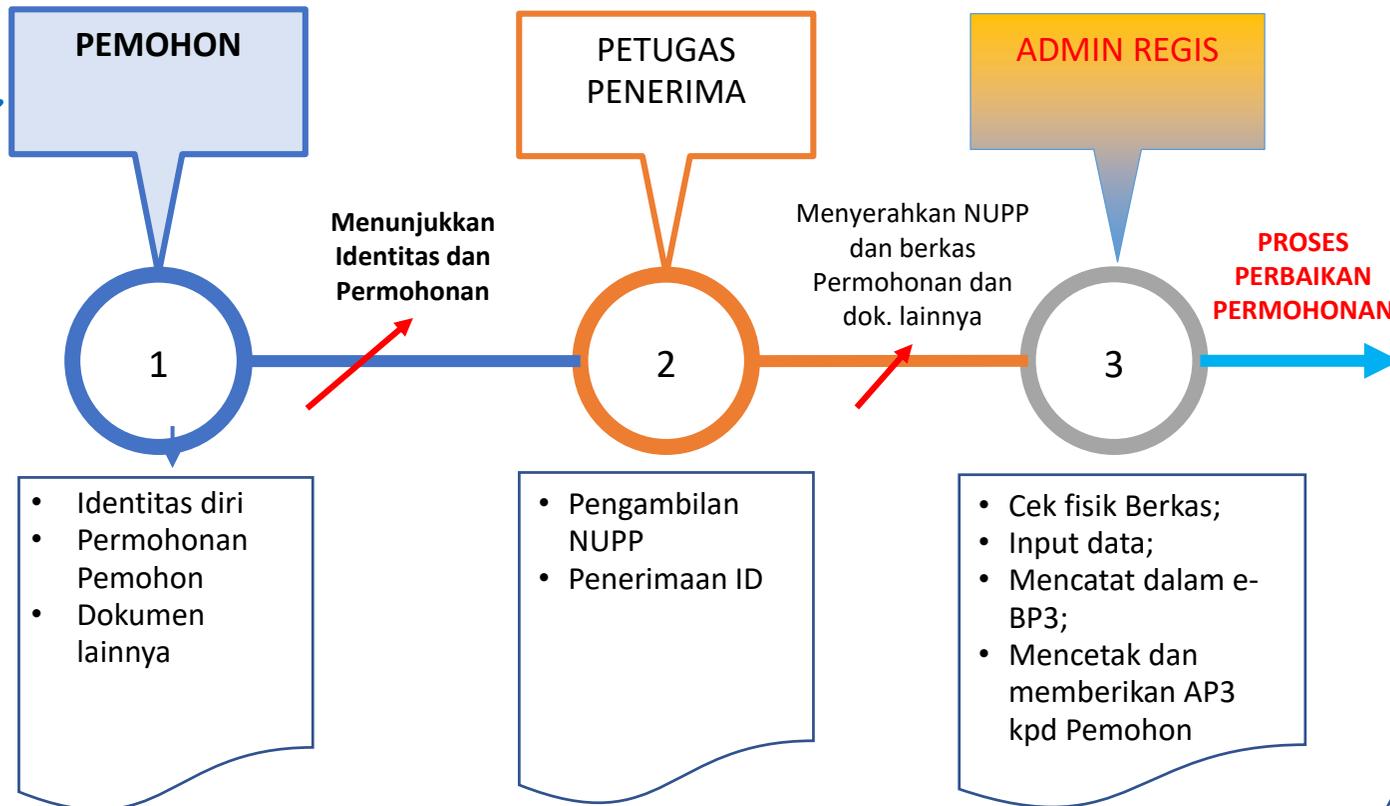
**Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (TENGGANG WAKTU 3 HARI KERJA SEJAK PENGUMUMAN OLEH KPU) PROV./KAB/KOTA

Pengumuman Hasil Pemilu
Kepala Daerah 2024
27 Nov. - 16 Des. 2024



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

Tenggang waktu pengajuan Perbaikan permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterima/dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon/Kuasa Hukum

Waktu Pengajuan Permohonan

Senin 16 Des.
2024,
24.00 WIB

Selasa 17 Des.
2024,
24.00 WIB

Rabu 18 Des.
2024,
24.00 WIB

Waktu Perbaikan Permohonan

Senin 16 Des.
2024,
24.00 WIB

Selasa 17
Des. 2024,
24.00 WIB

Rabu 18 Des.
2024,
24.00 WIB

Waktu Perbaikan Permohonan

Selasa 17 Des.
2024,
24.00 WIB

Rabu 18 Des.
2024,
24.00 WIB

Kamis 19 Des.
2024,
24.00 WIB

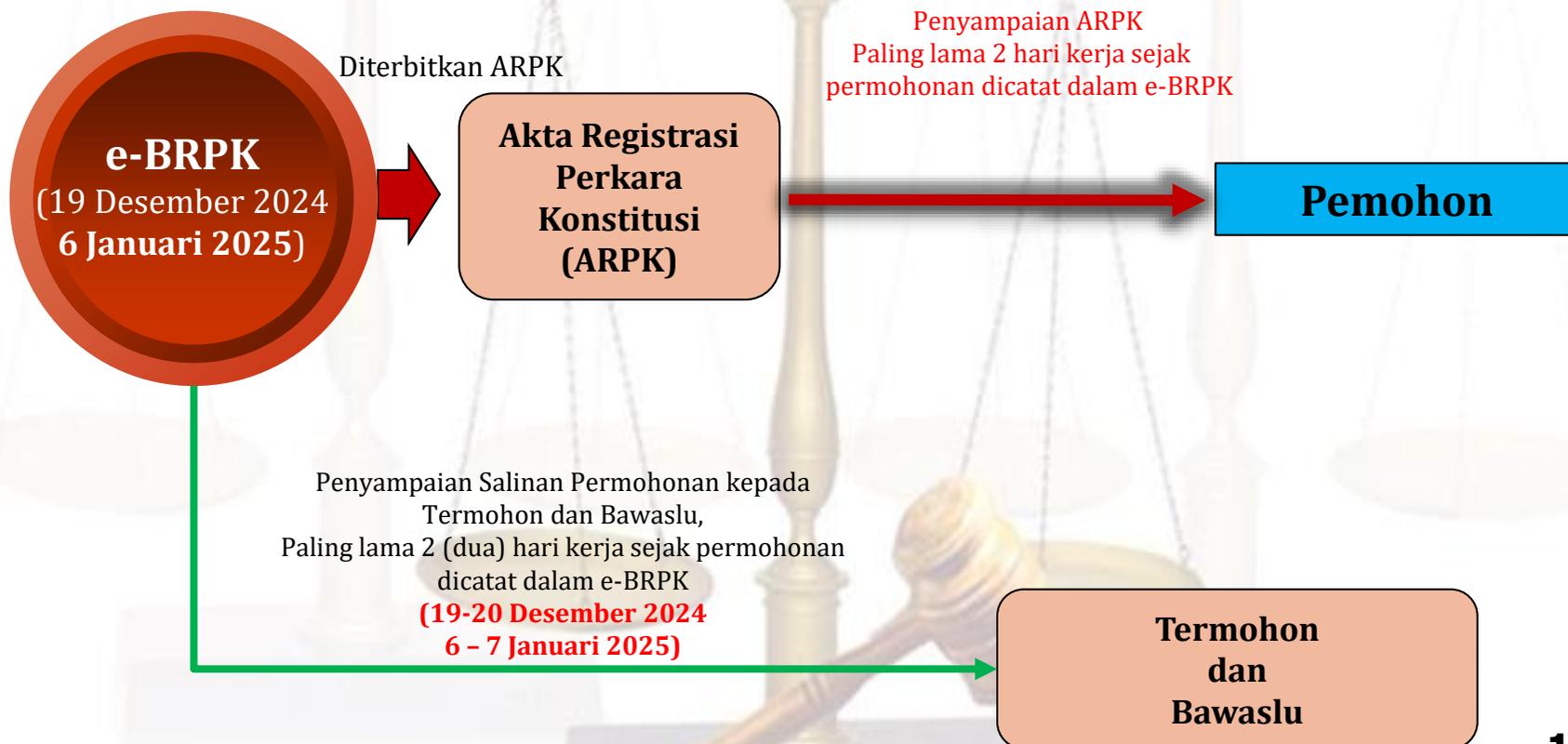
Waktu Perbaikan Permohonan

Rabu 18 Des.
2024,
24.00 WIB

Kamis 19
Des. 2024,
24.00 WIB

Jumat 20 Des.
2024,
24.00 WIB

PENCATATAN PERMOHONAN DALAM e-BRPK (REGISTRASI PERKARA) dan PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN



REGISTRASI

**ADMIN REGIS
REGISTRASI**

1

Permohonan dicatata dalam e-BRPK



E-BRPK

2

Panitera Menerbitkan ARPK

PEMOHON

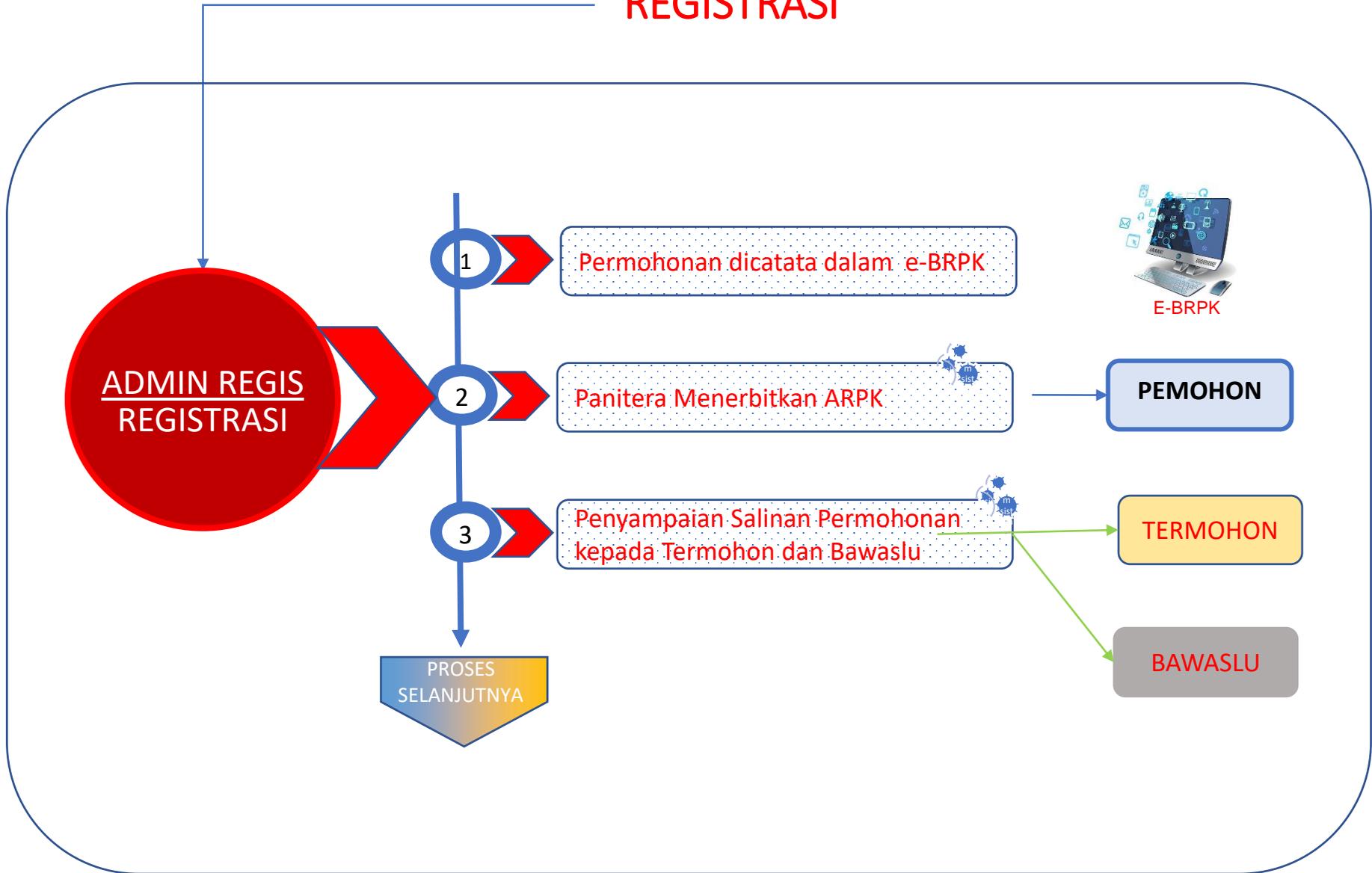
3

Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu

TERMOHON

BAWASLU

PROSES
SELANJUTNYA



PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT, PEMBAHASAN PERMOHONAN PT (RPH) DAN PENYAMPAIAN KETETAPAN PT



MEKANISME PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA KEPADA PARA PIHAK DAN BAWASLU

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Bawaslu,
Paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum Pemeriksaan Pendahuluan
(20 – 27 Desember 2024
7 – 10 Januari 2025)

**e-BRPK
(6 Januari
2025)**

Jurupanggil

Pemohon

Termohon

Pihak Terkait

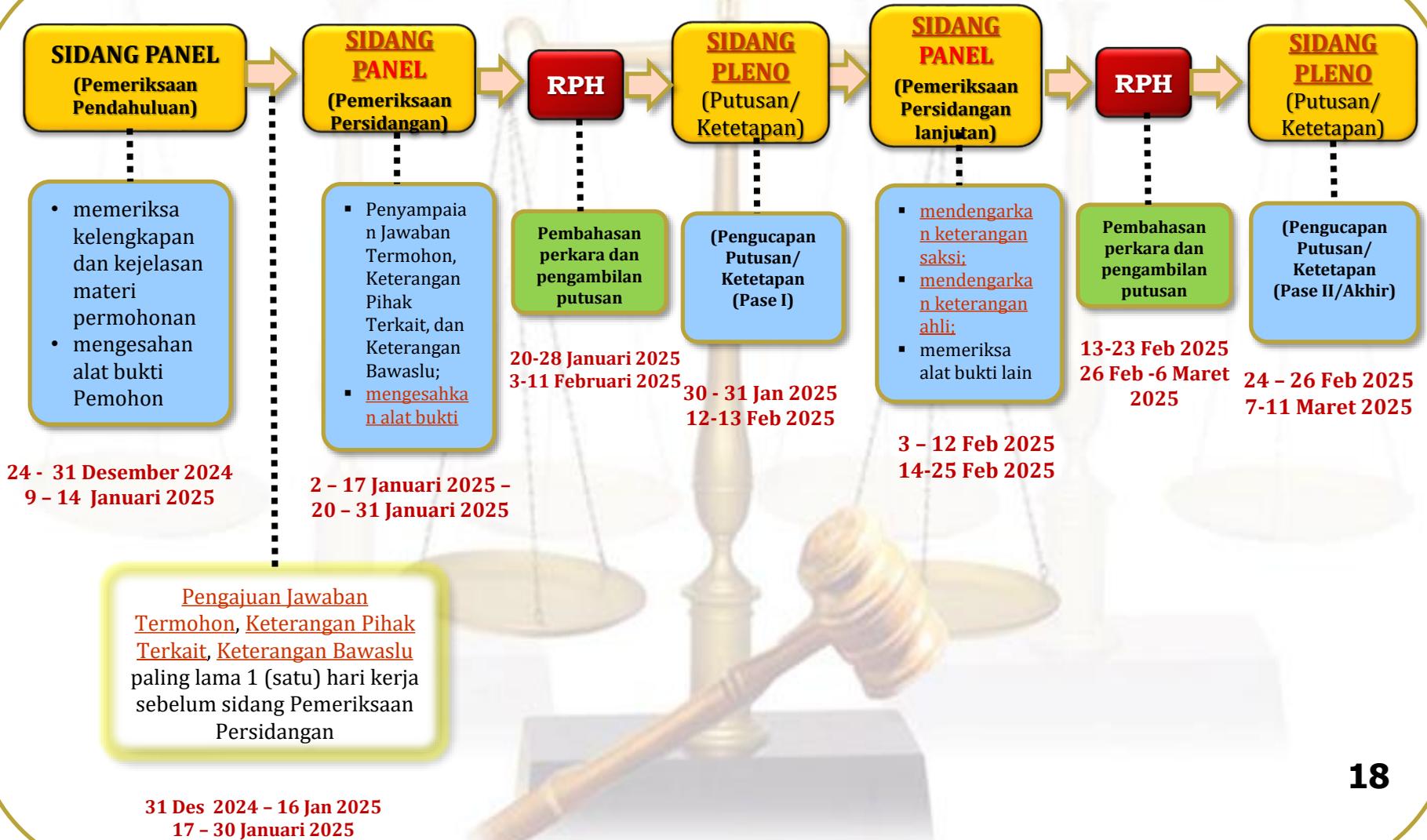
Bawaslu

**SIDANG
PERTAMA**

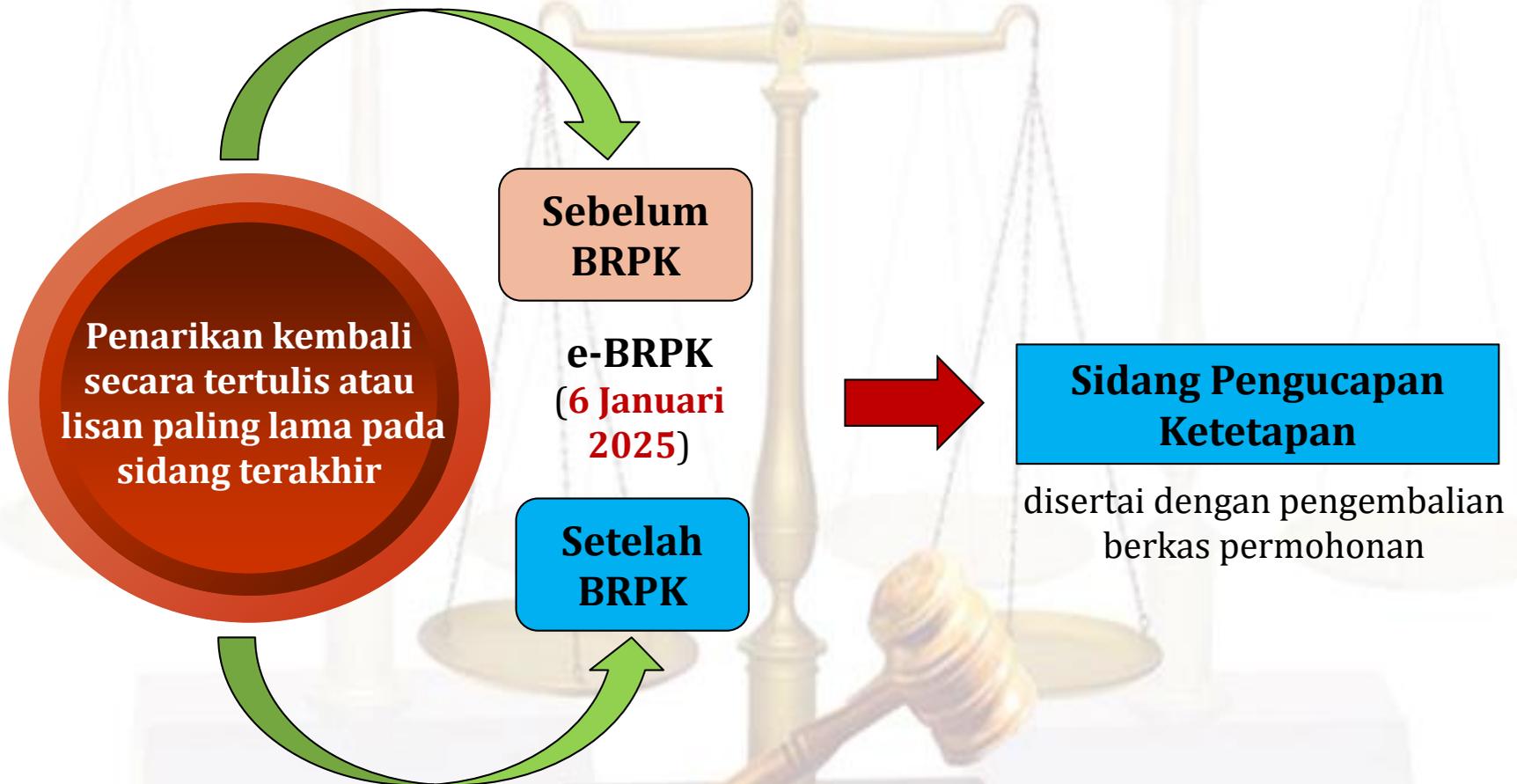
24 – 31 Desember 2024
9 – 14 Januari 2025

Pemeriksaan Pendahuluan
Paling lama 4 hari kerja setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam e-BRPK

MEKANISME PERSIDANGAN PHPU KADA



MEKANISME PENARIKAN KEMBALI





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**